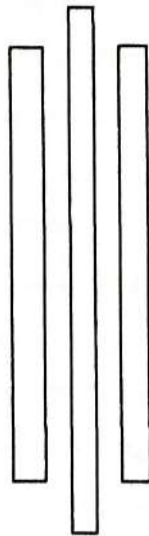




**PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
( APBKAL )  
TAHUN ANGGARAN 2026**



**PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**LEMBARAN KALURAHAN BENDUNG  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**Nomor 6**

**Tahun 2025**

**PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH BENDUNG**

- Menimbang:
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 4 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

14. Peraturan Desa Bendung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bendung Tahun 2019 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kal) Periode 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Kalurahan Bendung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Bendung Tahun 5 Nomor 4);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

dan

**LURAH BENDUNG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2026.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 3.139.306.603,00 (Tiga Milyar Dua Puluh Empat Juta Seratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.086.610.100,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.960.306.603,00
Surplus/(Defisit)	Rp	126.303.497,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	52.696.503,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	179.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp	126.303.497,00
SILPA Tahun Anggaran Berjalan	Rp	0,00

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

**Pasal 3**

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

#### Pasal 4

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dalam hal terjadi:
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
  - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
- (2) Dalam melakukan perubahan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

**Pasal 6**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan  
Bendung.

Ditetapkan di: Bendung  
pada tanggal : 24 Desember  
2025



Diundangkan dalam Berita Kalurahan Bendung Kapanewon Semin  
pada tanggal 24 Desember 2025

CARIK KALURAHAN,

Handwritten signature of Eka Puji Suryanti.

EKA PUJI SURYANTI

LEMBARAN KALURAHAN BENDUNG TAHUN 2025 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
 NOMOR 6 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.662.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.954.648.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	27.300.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.086.610.100,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	758.762.762,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	753.138.558,00	
5.3.	Belanja Modal	1.412.075.785,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.329.498,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.960.306.603,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>126.303.497,00</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	52.696.503,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	52.696.503,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	179.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	179.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(126.303.497,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	104.662.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.954.648.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	27.300.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.086.610.100,00</b>	
	<b>6.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.251.001.572,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>899.940.986,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	48.710.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	48.710.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	603.079.550,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	603.079.550,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	43.575.432,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	43.575.432,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	81.344.324,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.344.324,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.397.780,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.397.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.670.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	30.363.900,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.363.900,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.800.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>148.143.209,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.076.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.076.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	88.836.531,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	88.836.531,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja		
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	8.825.000,00	PAD, PBH
1.2.91		Pengadaan Mebel	8.825.000,00	
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	17.250.000,00	PAD
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	17.250.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	PAD, PBH
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.050.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.150.000,00	PBH
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.150.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	16.155.678,00	DLL, PAD
			16.155.678,00	
1.3.*		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>31.822.500,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan		
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	PBH
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.800.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.735.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.235.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.500.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	895.000,00	DDS
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	895.000,00	
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.255.000,00	PBP
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.255.000,00	
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.937.500,00	DDS
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	1.937.500,00	
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	PBP
			1.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>88.407.377,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)		
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	PBH
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.685.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.520.000,00	PBH
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.520.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	PBH
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.270.000,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.510.000,00	PBH
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.510.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	PBH
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.600.000,00	
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.245.000,00	PBP
			2.245.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.050.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.050.000,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.670.000,00	DDS
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	19.670.000,00	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.882.641,00	ADD
1.4.95		Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	9.882.641,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	PBH
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	3.675.000,00	
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	PBH
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	3.030.000,00	
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.269.736,00	PBH, PBP
1.4.99	5.3.	Belanja Modal	7.597.500,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>18.672.236,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	<b>82.887.600,00</b>	
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.550.000,00	PAD, PBH
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	79.550.000,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	PBH
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b>731.414.814,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>63.167.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.337.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.337.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	17.050.000,00	DDS
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	14.500.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4.780.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>118.763.600,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	24.250.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	8.521.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.521.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.002.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.002.500,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.250.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)		
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	DDS
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.100.000,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	DDS
2.2.96		Insentif kader kesehatan/KB	780.000,00	
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.850.000,00	DDS, PBP
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	72.850.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	201.496.314,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	197.415.060,00	DDS
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	197.415.060,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.081.254,00	DDS
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	4.081.254,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	39.160.000,00	
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.150.000,00	PBH, PBP
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	39.150.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	1.000.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	PBP
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	1.000.000,00	
2.8.01		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	307.848.000,00	
2.8.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.754.000,00	DDS
2.8.01	5.3.	Belanja Modal	9.514.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	20.240.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	250.525.000,00	PBH, PBP
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	250.525.000,00	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.569.000,00	DDS
2.8.91	5.3.	Belanja Modal	17.219.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>289.374.500,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.907.500,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.505.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.505.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.897.500,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.897.500,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	2.505.000,00	PAD
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.505.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	247.479.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.960.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	6.645.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.645.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	135.770.000,00	PBH, PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.520.000,00	
3.2.93	5.3.	Belanja Modal	112.250.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	15.163.500,00	PBP
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.163.500,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	28.770.000,00	DDS
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.770.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	52.171.000,00	PBH, PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.650.000,00	
3.2.99	5.3.	Belanja Modal	31.521.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.910.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.910.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.910.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>32.077.600,00</b>	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	15.540.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.540.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.807.500,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.807.500,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.740.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	6.990.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.990.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>652.186.219,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>660.060.719,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	15.349.264,00	PBH, PBP
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.319.264,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.030.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	517.117.000,00	PBH, PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	516.117.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.400.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.2.93		Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa	22.194.455,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.161.175,00	
4.2.93	5.3.	Belanja Modal	15.033.280,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>6.528.500,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.723.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.723.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.805.500,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.805.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	37.317.000,00	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.317.000,00	PBH, PBP
4.4.99	5.3.	Belanja Modal	6.862.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	30.455.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	45.582.000,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.457.000,00	DDS
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	4.457.000,00	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.125.000,00	DLL, PBH, PBP
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	525.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	40.600.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.698.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.698.000,00	PBP
5		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b>36.329.498,00</b>	
6.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>3.929.498,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanguangan Bencana	3.929.498,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.929.498,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>32.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.960.306.603,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>126.303.497,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	52.696.503,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	179.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(126.303.497,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMIN  
**PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG**

*Didik Rubiyanto*

Widorokidul RT. 002/003, Bendung, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55854  
Email : kantordesabendung@gmail.com Website : bendung-semin.desa.id

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNG  
DAN  
LURAH BENDUNG  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)  
TAHUN ANGGARAN 2026  
NOMOR : / KPTS / 2025 (Kalurahan)  
NOMOR : / KPTS / 2025 (BPKal)**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Belas* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua puluh Lima* bertempat di *Ruang Rapat* Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan acara Rapat Paripurna BPKal Bendung.

Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bendung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Bendung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawarah Kalurahan Bendung dan Lurah Bendung.





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON SEMIN  
**PEMERINTAH KALURAHAN BENDUNG**

*Widoro Kidul RT. 002/003 Bendung*

Widorokidul RT. 002/003, Bendung, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55854  
Email : kantordesabendung@gmail.com Website : bendung-semin.desa.id


**BERITA ACARA MUSYAWARAH BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BENDUNG  
DAN  
LURAH BENDUNG  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN BENDUNG  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Belas* bulan *November* tahun *Dua Ribu Dua puluh Lima* bertempat di *Ruang Rapat* Kalurahan Bendung Kapanewon Semin Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan acara Rapat Paripurna BPKal Bendung.

Menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Bendung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Bendung Tahun Anggaran 2026 untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir








Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Bendung dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawarah Kalurahan Bendung dan Lurah Bendung.




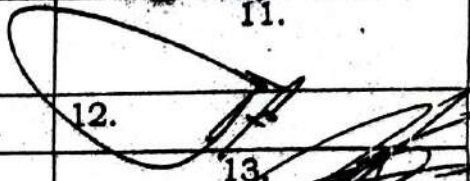

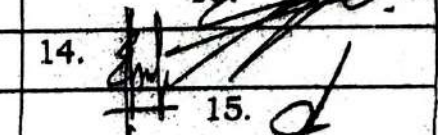
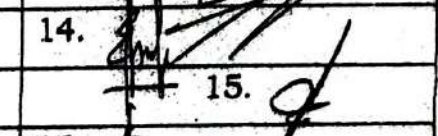
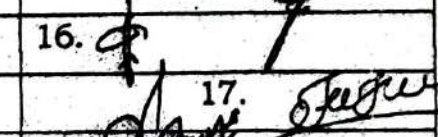
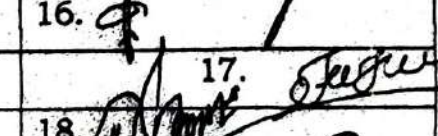
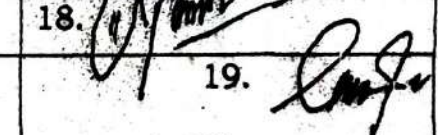
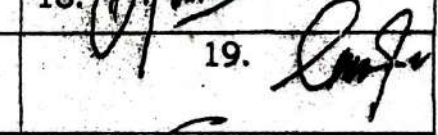
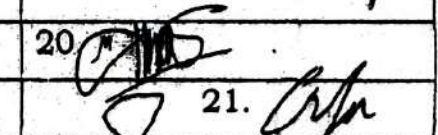
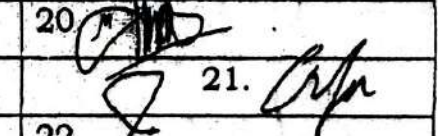
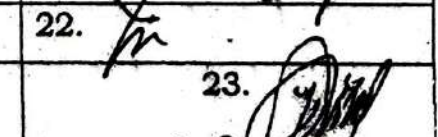
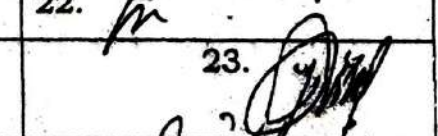
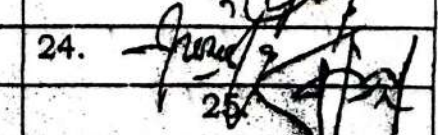
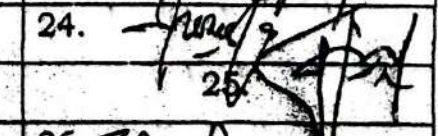
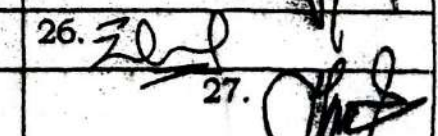
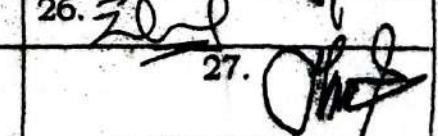
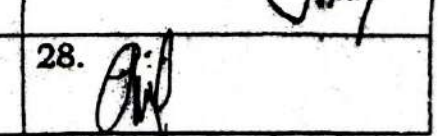
  
BPKal  
M. Pd

  
Lurah  
*[Signature]*  
DIPERUBIYANTO

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN**  
**PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

Hari/Tanggal : Rabu, 12 November 2026  
 Waktu : 15.00 - Selesai  
 Tempat : Ruang Rapat Kalurahan Bendung  
 Acara : Paripurna APBKal TA. 2026

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUGIYO, S.Pd., M.Pd.	Ketua	1. 
2	JUMADI	Wakil Ketua	2. 
3	RUBAN BINTORO	Kabid. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	3. 
4	ISMAIL SHALEH, S.H	Anggota Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan & Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	4. 
5	KASDI ADI SIMANTA	Anggota Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan & Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	5. 
6	YATIMAN	Kabid, Bidang Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	6. 
7	JUMINI	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan	7. 

		Masyarakat Kelurahan	
8	YULIA TRI UTAMI	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	8. 
9	SYAIFUL ANWAR	Anggota Bidang Pembangunan Kalurahan & Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	9. 
10	DIDIK RUBIYANTO	Lurah	10. 
11	EKA PUJI SURYANTI, S.Akun.	Carik	11. 
12	SUGIYATNO	Jagabaya	12. 
13	DWI ANDRIYANTO	Ulu-Ulu	13. 
14	EKA MAWARNI	Kamituwo	14. 
15	PARWITO	Pangripta	15. 
16	DWI KUSTINI	Tata Usaha & Umum	16. 
17	ZULFIKAR FARIZ AZIZ	Danarta	17. 
18	SUJONO	Dukuh Bendung	18. 
19	IRWAN AGUS NUGROHO	Dukuh Gobeh	19. 
20	SITI FATHONAH	Dukuh Widorokidul	20. 
21	WAGIMIN	Dukuh Pencil	21. 
22	ISWANTO	Dukuh Widorolor	22. 
23	BAMBANG SUPRIYANTO	Dukuh Banyukendil	23. 
24	WARSITO	Dukuh Garotan	24. 
25	DWI SUJATMIKO	Dukuh Dringo	25. 
26	ENDANG PRIYANTI	Dukuh Dawe	26. 
27	NIA NURYANI	Staff Pemerintah Kalurahan	27. 
28	ANNISA SEKAR WIDARI	Staff Pemerintah Kalurahan	28. 